

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2015 Desa Wilangan.

Dokumen RPJM Desa ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana di tingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 Desa Wilangan ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

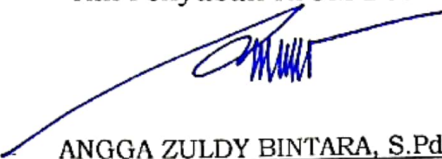
Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJM Desa Tahun 2019–2025 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan desa.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wilangan, 30 Agustus 2019

Tim Penyusun RPJM Desa



ANGGA ZULDY BINTARA, S.Pd

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
Perdes RPJM Desa Tahun 2019-2025	
Lampiran RPJM Desa Tahun 2019-2025	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	3
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	6
2.1. Sejarah Desa	6
2.2. Gambaran Kependudukan	7
2.3. Gambaran Kelembagaan	7
2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa	12
2.5. Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa	15
2.6. Gambaran Insfratraktur	25
2.7. Masalah dan Potensi Desa	27
BAB III VISI, MISI , KEBIJAKAN DAN ARAH PEMBANGUNAN	30
3.1 Visi	31
3.2 Misi	31
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	32
3.4 Sasaran	35
BAB IV PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	43
4.1 Program Indikatif	44
4.2 Matriks RPJM Desa	51
BAB V PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

	Hal
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Jumlah Penduduk berdasarkan usia	7
2.2. Nama Pejabat Pemerintah Desa	8
2.3. Nama Badan Permusyawaratan Desa	8
2.4. Nama Pengurus LPM Desa	9
2.5. Pengurus Karang Taruna Desa	9
2.6. Tim Penggerak PKK Desa	10
2.7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	10
2.8. Nama Ketua RT / RW	10
2.9. Tingkat Perkembangan Desa	12
2.10. Jumlah Penduduk Miskin Desa	13
2.11. Tingkat keberhasilan bidang pemerintahan desa	13
2.12. Tingkat keberhasilan bidang pendidikan	15
2.13. Tingkat keberhasilan bidang kesehatan	16
2.14. Tingkat keberhasilan bidang perumahan dan permukiman	16
2.15. Tingkat keberhasilan bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17
2.16. Tingkat keberhasilan bidang ketenagakerjaan	18
2.17. Tingkat keberhasilan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18
2.18. Tingkat keberhasilan bidang lingkungan hidup	19
2.19. Tingkat keberhasilan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19
2.20. Tingkat keberhasilan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20
2.21. Tingkat keberhasilan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21
2.22. Tingkat keberhasilan bidang Komunikasi dan Informatika	22
2.23. Tingkat keberhasilan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya	23
2.24. Tingkat keberhasilan bidang pertanian	24
2.25. Jumlah Fasilitas Umum	25
2.26. Data Panjang Jalan Tahun 2019	26

2.27. Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2019	26
2.28. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan 2019	26
2.29. Data Potensi Sumber Daya Alam	29
2.30. Data Potensi Sumber Daya Manusia	29
 BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
3.1 Sasaran Utama RPJM Desa	35
3.2 Sasaran Sektoral RPJM Desa	36

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA WILANGAN

PERATURAN DESA WILANGAN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA WILANGAN
TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WILANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wilangan Tahun 2019-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WILANGAN
dan
KEPALA DESA WILANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA WILANGAN TAHUN 2019 – 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Wilangan dibantu Perangkat Desa Wilangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wilangan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Wilangan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Wilangan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa Wilangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 2

(1) RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Gambaran Kependudukan
 - 2.3 Gambaran Kelembagaan
 - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
 - 2.5 Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa
 - 2.6 Gambaran Infrastruktur
 - 2.7 Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 - 3.1 Visi
 - 3.2 Misi
 - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
 - 3.4 Sasaran
- d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
 - 4.1 Program Indikatif
 - 4.2 Matriks RPJM Desa
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Untuk melaksanakan RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wilangan.

Ditetapkan di Wilangan
Pada tanggal 30 Agustus 2019

KEPALA DESA WILANGAN



LINA MUNTIANI



Diundangkan di Wilangan
Pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DESA WILANGAN



ANGGA ZULDY BINTARA



LEMBARAN DESA WILANGAN TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WILANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025

BABI PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan Desa.
- c. Dimilikinya rumusan nilai-nilai strategis desa, rumusan visi dan misi desa, analisis lingkungan strategis desa, penentuan isu-isu strategis desa, penentuan bidang-bidang strategis desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
- d. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa
- e. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

1.3 Dasar Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Wilangan disusun atas dasar ;

A. Landasan Idiil : Pancasila

B. Landasan Konstitusional : UUD 1945

C. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Wilangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Sejarah Desa

Sejarah Desa Wilangan tidak terlepas dari sejarah masyarakat Pedesaan di Kabupaten Nganjuk. Pada awalnya Desa Wilangan masuk pada wilayah Kecamatan Bagor, namun pada program pembangunan pemerintah tahun 1971 terjadi perluasan kecamatan yaitu Kecamatan Wilangan . Pada tahun tersebut Desa Wilangan masuk pada salah satu desa di Kecamatan Wilangan.

Berikut adalah kepala Desa yang tercatat pernah memimpin Desa Wilangan selama ini :

1. WONGSODIHARJO(Tahun 1930 s/d 1938)
2. SINGODIRYO (Tahun 1938 s/d 1960)
3. SUKARDI (Tahun 1961 s/d 1998)
4. KARNI (Tahun 1999 s/d 2007)
5. BUDYANTO, S.Pd (Tahun 2007 s/d 2013)
6. KARNI (Tahun 2013 s/d 2019)
7. LINA MUNTIANI (Tahun 2019 s/d Sekarang)

Secara administratif, Desa Wilangan terletak di wilayah Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Batas – batas desa meliputi :

No	Uraian	Desa / Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Bandungan, Saradan
2.	Sebelah Barat	Pajaran, Saradan
3.	Sebelah Selatan	Ngadipiro, Wilangan
4.	Sebelah Timur	Mancon, Wilangan

Jarak tempuh Desa Wilangan ke ibukota Kecamatan Wilangan adalah 0 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 13 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 Menit.

2.2 Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2018, jumlah penduduk Desa Wilangan terdiri dari 1.695 KK, dengan jumlah total penduduk 5.658 jiwa, dengan rincian 2.824 laki-laki dan 2.834 perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	193	174	367	6,5 %
2	5-9	145	161	306	5 %
3	10-14	178	193	370	6,5 %
4	15-19	184	205	389	7 %
5	20-24	186	170	356	6 %
6	25-29	202	192	394	7 %
7	30-34	272	292	564	10 %
8	35-39	263	250	513	9 %
9	40-44	264	237	501	9 %
10	45-49	169	182	351	6 %
11	50-54	171	193	364	6 %
12	55-58	129	151	280	5 %
13	>59	468	434	902	17 %
Jumlah Total		2.824	2.834	5.658	100 %

Sumber Data : Profil Desa tahun 2018

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Wilangan sekitar 2.579 orang atau hampir 46 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

2.3 Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2
Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1.	Lina Muntiani	Kepala Desa
2.	Angga Zuldy Bintara, S.Pd	Sekretaris Desa
3.	Kosong	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Iswandi	Kaur Keuangan
5.	Eyan Novi Hendrianto	Kaur Perencanaan
6.	Sunariati, S.sos	Kasi Pemerintahan
7.	Agus Qoirul Matsum	Kasi Kesejahteraan
8.	Ladi	Kasi Pelayanan
9.	Damiran	Kasun Wilangan
10.	Lamidin	Kasun Jatisari
11.	Sumijan	Kasun Jegong
12.	Paryono	Kasun Tampang

Sumber Data : Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Catatan : disesuaikan dengan klasifikasi desa (swadaya, swakarya, Swasembada)

Tabel 2.3
Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1.	Juri	Ketua merangkap anggota
2.	Supiyan, S.Pd, M.Pd	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Sutrisno	Sekretaris
4.	Suparjo	Ketua Bidang penyelenggaraan Pemdes merangkap anggota
5.	Warsono	Ketua Bidang Pembangunan Desa Merangkap anggota
6.	Sukadi	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Merangkap anggota
7.	Minto	Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat Merangkap anggota
8.	Nyamat	Anggota
9.	Kateni	Anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nomor 188/470/K/411.012/2018 Tahun 2018

Tabel 2.4
Nama - nama Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	Mukhyar Rifa'i, S.Ag	Ketua
2	Ahmad Zubaidil	Sekretaris
3	Nurhadi	Bendahara
4	Ibnu Ruslan	Seksi Agama
5	Pribadi	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	Nurul Hidayati, S.Pd	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
7	Paryono	Seksi Lingkungan Hidup
8	Sumiran	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9	Dawam	Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
10	Ja'is	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data : Keputusan Kepala Desa Nomor 21 Tahun 2019

Tabel 2.5
Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	Dimas Aryanto	Ketua
2	Refan Bahatsa	Wakil Ketua
3	Ikhfan Muzakhi S.	Sekretaris
4	Vicky Aditya	Wakil Sekretaris
5	Martha Qori N.J.	Bendahara
6	Dhea	Wakil Bendahara
7	Sunoto	Seksi Keamanan dan Ketertiban
8	Taufik Riski K.	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
9	Ajib	Seksi Lingkungan Hidup
10	Hartanto	
11	Pendi	
12	Bagus	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
13	Ridwan	
14	Santo	Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
15	Alfian	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data : Keputusan Kepala Desa Nomor 22 Tahun 2019

Tabel 2.6
Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	Winarsih	Ketua
2	Lhia Dwi Agustina	Wakil Ketua
3	Hardianti Agustin P.	Sekretaris I
4	Meyka R.	Sekretaris II
5	Maria Isiana Ulfah	Bendahara I
6	Yanti Yunita	Bendahara II
7	Lilik Sugiarti	Ketua Pokja 1
8	Widayanti	Ketua Pokja 2
9	Winarti S.	Ketua Pokja 3
10	KristiWidiati, SST.Keb	Ketua Pokja 4

Sumber Data : Keputusan Kepala Desa Nomor 20 Tahun 2019

Tabel 2.7
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	Samino	KPMD Bidang Teknik
2	Nanik Mulyani	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3	Suryanto	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4	Winarsih	KPMD Bidang Kesehatan
5	Lilik Sugiarti	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data : Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2019

Tabel 2.8
Nama – Nama Ketua RT / RW

No	Nama	Jabatan
1	Suratim	Ketua RW. 1 Dsn. Wilangan
2	Muji Prayitno	Ketua RW. 2 Dsn. Wilangan
3	Paidin	Ketua RT. 1 Dsn. Wilangan
4	Kuat Subagyo, S.Pd	Ketua RT. 2 Dsn. Wilangan
5	Suwaji	Ketua RT. 3 Dsn. Wilangan
6	Juri, S.Ag	Ketua RT. 4 Dsn. Wilangan
7	Supiyan, S.Pd, M.Pd	Ketua RT. 5 Dsn. Wilangan
8	Saipul	Ketua RT. 6 Dsn. Wilangan
		10

9	Eko Hadi Suparno	Ketua RT. 7 Dsn. Wilangan
10	Samuri	Ketua RW. 1 Dsn. Jatisari
11	Watiran	Ketua RW. 2 Dsn. Jatisari
12	Arifin	Ketua RT. 1 Dsn. Jatisari
13	Sutrisno	Ketua RT. 2 Dsn. Jatisari
14	Sunaryo	Ketua RT. 3 Dsn. Jatisari
15	Sarimin	Ketua RT. 4 Dsn. Jatisari
16	Sutrisno	Ketua RW. 1 Dsn. Jegong
17	Parkun	Ketua RW. 2 Dsn. Jegong
18	Galiyem	Ketua RT. 1 Dsn. Jegong
19	Nyono	Ketua RT. 2 Dsn. Jegong
20	Surat	Ketua RT. 3 Dsn. Jegong
21	Sumiran	Ketua RT. 4 Dsn. Jegong
22	Poniran	Ketua RT. 5 Dsn. Jegong
23	Sujito	Ketua RT. 6 Dsn. Jegong
24	Guntur	Ketua RT. 7 Dsn. Jegong
25	Hendro P.	Ketua RW. 1 Dsn. Tampang
26	Sardi	Ketua RW. 2 Dsn. Tampang
27	Sakiman	Ketua RT. 1 Dsn. Tampang
28	Slamet	Ketua RT. 2 Dsn. Tampang
29	Tono	Ketua RT. 3 Dsn. Tampang
30	Ahmad Prasetyawan	Ketua RT. 4 Dsn. Tampang
31	Wiyono	Ketua RT. 5 Dsn. Tampang
32	Yudianto	Ketua RT. 6 Dsn. Tampang
33	Kasidi	Ketua RT. 7 Dsn. Tampang
34	Warsito	Ketua RT. 8 Dsn. Tampang

Sumber Data : Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2019

9	Eko Hadi Suparno	Ketua RT. 7 Dsn. Wilangan
10	Samuri	Ketua RW. 1 Dsn. Jatisari
11	Watiran	Ketua RW. 2 Dsn. Jatisari
12	Arifin	Ketua RT. 1 Dsn. Jatisari
13	Sutrisno	Ketua RT. 2 Dsn. Jatisari
14	Sunaryo	Ketua RT. 3 Dsn. Jatisari
15	Sarimin	Ketua RT. 4 Dsn. Jatisari
16	Sutrisno	Ketua RW. 1 Dsn. Jegong
17	Parkun	Ketua RW. 2 Dsn. Jegong
18	Galiyem	Ketua RT. 1 Dsn. Jegong
19	Nyono	Ketua RT. 2 Dsn. Jegong
20	Surat	Ketua RT. 3 Dsn. Jegong
21	Sumiran	Ketua RT. 4 Dsn. Jegong
22	Poniran	Ketua RT. 5 Dsn. Jegong
23	Sujito	Ketua RT. 6 Dsn. Jegong
24	Guntur	Ketua RT. 7 Dsn. Jegong
25	Hendro P.	Ketua RW. 1 Dsn. Tampang
26	Sardi	Ketua RW. 2 Dsn. Tampang
27	Sakiman	Ketua RT. 1 Dsn. Tampang
28	Slamet	Ketua RT. 2 Dsn. Tampang
29	Tono	Ketua RT. 3 Dsn. Tampang
30	Ahmad Prasetyawan	Ketua RT. 4 Dsn. Tampang
31	Wiyono	Ketua RT. 5 Dsn. Tampang
32	Yudianto	Ketua RT. 6 Dsn. Tampang
33	Kasidi	Ketua RT. 7 Dsn. Tampang
34	Warsito	Ketua RT. 8 Dsn. Tampang

Sumber Data : Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2019

2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 dan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, tingkat perkembangan Desa meliputi:

- Cepat Berkembang
- Berkembang
- Kurang Berkembang

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, tingkat perkembangan Desa dalam penyusunan SOTK meliputi:

- Desa Swasembada
- Desa Swakarya; dan
- Desa Swadaya

Sedangkan berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016, tingkat perkembangan Desa meliputi:

- Desa Mandiri
- Desa Maju
- Desa Berkembang
- Desa Tertinggal
- Desa Sangat Tertinggal

Hasil pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2013–2019 menghasilkan perkembangan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tingkat Perkembangan Desa Wilangan
Periode 2013-2019

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes Nomor 2 Tahun 2016
2014	Berkembang	Desa Swasembada	Desa Berkembang
2015	Berkembang	Desa Swasembada	Desa Berkembang
2016	Berkembang	Desa Swasembada	Desa Berkembang
2017	Berkembang	Desa Swasembada	Desa Berkembang
2018	Berkembang	Desa Swasembada	Desa Berkembang
2019	Berkembang	Desa Swasembada	Desa Berkembang

Sumber data : IDM dan Profil Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2013-2019 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Desa Wilangan
Periode 2013-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2014	1.417 Orang
2015	1.417 Orang
2016	1.417 Orang
2017	1.417 Orang
2018	1.363 Orang
2019	1.363 Orang

Sumber data : Basis Data Terpadu Kemiskinan

Di bidang Pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian kinerja Pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa
Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Keuangan dan aset Desa:					
a. persentase PAD terhadap total Pendapatan APB Desa (%)	0,45 %	19,6 %	8,7 %	8 %	6,8 %
b. persentase sertifikasi tanah aset desa (jumlah tanah aset yang telah bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah aset desa kali 100%)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2. Kepatuhan kewajiban:					
a. penyusunan RKP Desa (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun
b. penyusunan APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun
	13				

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
c. penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun
d. penyusunan LPPD (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun
e. penyusunan LKPPD (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun	Tersusun
f. persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat (jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan kali 100%)	95 %	98 %	100 %	100 %	100 %
3. Predikat LPPD hasil evaluasi Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4. Kinerja Perangkat Desa:					
a. jumlah Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan	1	1	0	0	0
b. jumlah Perangkat Desa yang menyusun Program Kerja Tahunan	10	8	7	11	11
c. jumlah Perangkat Desa yang menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas	10	8	7	11	10

Sumber data : IDM dan Profil Desa

2.5 Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa

2.5.1 Pendidikan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013–2019, capaian pelayanan masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2013–2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Angka Partisipasi SD/MI:				
	a. jumlah penduduk usia SD/MI	284	271	285	269
	b. jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah SD/MI	284	271	285	269
	c. Jumlah penduduk usia SD/MI yang tidak bersekolah SD/MI	-	-	-	-
2	Angka Partisipasi SMP/MTs:				
	a. jumlah penduduk usia SMP/MTs	127	133	145	141
	b. jumlah penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah SMP/MTs	127	133	145	141
	c. jumlah penduduk usia SMP/MTs yang tidak bersekolah SMP/MTs	-	-	-	-
3	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:				
	a. jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA	118	126	135	137
	b. jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang bersekolah SMA/SMK/MA	118	126	135	137
	c. jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah SMA/SMK/MA	-	-	-	-
4	Angka Partisipasi PAUD:				
	a. jumlah penduduk usia PAUD	272	285	158	152
	b. jumlah penduduk usia PAUD yang bersekolah PAUD	260	272	147	143
	c. jumlah penduduk usia PAUD yang tidak bersekolah PAUD	12	13	11	9
5	Jumlah lembaga Sekolah:				
	a. PAUD	4	4	4	4
	b. SD/MI	4	4	4	4
	c. SMP/MTs	1	1	1	1
	d. SMA/MA/SMK	1	1	1	1
6	Perpustakaan Desa:				
	a. jumlah koleksi buku (buah)	0	0	0	80
	b. jumlah rata-rata pengunjung tiap bulan (orang)	0	0	0	0

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

2.5.2 Kesehatan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013–2019, capaian pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2016–2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kematian Bayi	0	0	2	0
2	Angka Kematian Ibu	0	0	0	0
3	Balita dengan gizi buruk	9	9	9	6
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	52	49	43	54
5	Jumlah:				
	a. Pratama	0	0	0	0
	b. Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
	c. Purnama	0	0	0	0
	d. Mandiri	0	0	0	0
7	Jumlah fasilitas kesehatan:				
	a. Jumlah Posyandu	5	5	5	5
	b. Polindes	1	1	1	1
	c. Poskesdes	0	0	0	0

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

2.5.3 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013–2019, capaian pelayanan masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Pelayanan Air bersih:				
	a. jumlah Rumah Tangga	1.732	1.704	1.711	1.711
	b. jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih dengan sistem perpipaan	143	143	157	157
2	Rumah layak huni:				
	a. jumlah rumah tidak layak huni	16	16	12	12
	b. jumlah rumah layak huni	1.523	1.534	1.537	1.546
3	Sanitasi:				
	a. jumlah rumah tangga memiliki jamban	1.462	1.465	1.478	1.482
	b. jumlah rumah tangga tidak memiliki jamban	270	239	233	229

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

- 2.5.4 Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2017-2019

No.	Uraian	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan:			
	a. pembunuhan	0	0	0
	b. penganiayaan berat	0	0	0
	c. penganiayaan ringan	0	1	0
	d. kekerasan dalam rumah tangga	1	0	0
	e. perkosaan	0	0	0
	f. pencabulan	0	0	0
	g. penculikan	0	0	0
	h. pencurian dengan kekerasan	0	0	0
	i. pencurian biasa	0	0	0
	j. pencurian kendaraan bermotor	0	1	0
	k. pencurian dengan pemberatan	0	0	0
	l. pengrusakan/penghancuran barang	0	0	0
	m. pembakaran dengan sengaja	0	0	0
	n. narkoba dan psikotropika	0	1	0
	o. penipuan / perbuatan curang	0	0	0
	p. penggelapan	0	0	0
	q. korupsi	0	0	0
	r. kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0
	Jumlah total kejahatan	0	2	0
2.	Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:			
	a. jumlah Linmas	31	31	31
	b. jumlah Poskamling	17	18	18

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

2.5.5 Ketenagakerjaan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2016-2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk usia produktif	3.782	3.786	3.804	3.804
2	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja	3.367	3.374	3.490	3.490
3	Jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja	415	412	314	314

Sumber data : Profil Desa Tahun 2019

2.5.6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Tingkat keberhasilan bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Tahun 2018

No.	Uraian	Perempuan	Anak	Jumlah
1.	Perkosaan	0	0	0
2.	Persetubuhan	0	0	0
3.	Pencabulan	0	0	0
4.	Pelecehan Seksual	0	0	0
5.	KDRT	0	1	0
6.	Kekerasan Fisik	0	1	0
7.	Kekerasan Psikis	0	0	0
8.	Penelantaran	0	0	0
9.	Trafficking	0	0	0
10.	Asuh/Eksekusi Anak	0	0	0
11.	Anak Bermasalah Hukum	0	0	1
12.	Lain-lain	0	0	0
Total		0	2	1

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

2.5.7 Lingkungan Hidup

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	0	0	0	0
2. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	0	0	0	0
3. Luas Ruang Terbuka Hijau/ RTH (Ha)	0	0	0	0
4. Sarana pengelolaan sampah:				
a. jumlah tempat pembuangan sampah sementara / TPS (unit)	1	1	1	1
b. jumlah kendaraan pengangkut sampah (unit)	0	0	0	0
c. jumlah petugas pengelola sampah (orang)	0	0	0	0

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

2.5.8 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013 - 2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Tingkat Keberhasilan
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
1. Persentase penduduk memiliki KK (jumlah penduduk memiliki KK dibagi jumlah penduduk wajib KK dikalikan 100%)	95 %	95 %	97 %	97 %
	19			

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
2. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (jumlah penduduk memiliki Akte Kelahiran dibagi jumlah penduduk wajib Akte Kelahiran dikalikan 100%)	42 %	47 %	80 %	98 %
3. Persentase penduduk memiliki KTP (jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%)	84 %	84 %	95 %	98 %
4. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (jumlah penduduk meninggal dengan akte kematian dibagi jumlah penduduk meninggal dunia dikalikan 100%)	0 %	0 %	0 %	5 %

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

2.5.9 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 2016-2019 capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
Tingkat Keberhasilan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2016 - 2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
1. BUM Desa:				
a. Status keaktifan BUM Desa	Tidak aktif	Tidak aktif	Aktif	Aktif
b. Jumlah bagi hasil BUM Desa ke PAD (Rp)	0	0	0	0
2. Jumlah lembaga ekonomi desa aktif (lembaga)	1	1	1	1
3. Jumlah koperasi (unit)	1	1	1	1
4. Jumlah usaha mikro/ UMKM (unit)	96	96	104	104
	20			

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
5. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	0	0
6. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	12	24	48	48

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

2.5.10 Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21
Tingkat Keberhasilan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
1. Jumlah peserta KB baru (orang)	152	330	283	91
2. Jumlah peserta KB aktif (orang)	725	787	780	822
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	342	264	212	212

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

2.5.11 Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
1. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa:				
a. website	0	0	0	0
b. media sosial	0	0	0	0
c. radio komunitas	0	0	0	0
d. koran desa	0	0	0	0
e. papan pengumuman	1	1	4	4
2. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:				
a. website (kali per minggu)	0	0	0	0
b. media sosial (kali per minggu)	0	0	0	0
c. radio komunitas (kali per minggu)	0	0	0	0
d. koran desa (kali per minggu)	0	0	0	0
3. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat / KIM (kelompok)	1	1	1	1
4. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas:				
a. Internet	315	315	227	227
b. Telekomunikasi	315	315	227	227

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

2.5.12 Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013 - 2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.23
Tingkat keberhasilan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya
tahun 2016 - 2019

Indikator	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
2. Jumlah Pemuda berprestasi:					
a. Tingkat Kecamatan (orang)	0	0	0	0	2
b. Tingkat Kabupaten (orang)	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (orang)	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (orang)	0	0	0	0	0
3. Jumlah prestasi Olahraga :					
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	0	0	2
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0
4. Jumlah prestasi Seni Budaya:					
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0
5. Jumlah sarana prasarana:					
a. Olah raga	2	2	3	3	3
b. Seni budaya	0	0	0	1	1
6. Jumlah penyelenggaraan event di desa tiap tahun:					
a. Olah raga (kegiatan)	0	0	1	1	1
b. Seni budaya (kegiatan)	0	0	0	0	1

Sumber: data : Profil Desa Tahun 2018

2.5.13 Pertanian

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013 - 2019, capaian pelayanan masyarakat bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Tingkat keberhasilan bidang pertanian
tahun 2016 - 2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan.						
a. Tanaman Pangan						
a. Padi	Ton	2.015	2.015	2.027	2.040	1.913
b. Jagung	Ton	180	180	180	201	192
c. Kedelai	Ton	0	0	0	0	0
b. Tanaman Hortikultura						
a. Bawang merah	Kw	68	64	70	70	70
b. Cabai Rawit	Kw	0	0	0	0	0
c. Cabe Merah	Kw	0	0	0	0	0
d. Melon	Kw	0	0	0	0	0
e. Garbis	Kw	0	0	0	0	0
f. Durian	Buah	0	0	0	0	0
g. Alpukat	Kw	0	0	0	0	0
h. Jeruk	Kw	0	0	0	0	1.130
i. Mangga	Kw	2.821	2.821	2.821	2.700	2.744
j. Rambutan	Kw	0	0	0	0	0
c. Tanaman Perkebunan						
a. Kakao	Ton	0	0	0	0	0
b. Cengkeh	Ton	0	0	0	0	0
c. Kopi	Ton	0	0	0	0	0
d. Kelapa	Ton	0	0	0	0	0
e. Tebu	Ton	16	16	16,5	16,5	17
f. Tembakau	Ton	0	0	0	0	0
g. Nilam	Ton	0	0	0	0	0
h. Wijen	Ton	0	0	0	0	0
2. Produksi Hasil Peternakan						
a. Ternak besar	Ekor	277	277	309	309	309
b. Ternak kecil	Ekor	135	135	135	147	147
c. Ternak unggas	Ekor	2.000	2.000	3.670	5.200	5.200

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

2.5.14 Fasilitas Umum

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013 - 2019, capaian jumlah fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.25
Jumlah Fasilitas Umum
Tahun 2016 - 2019

Jenis Fasilitas Umum	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
1. Prasarana ibadah				
a. Masjid	6	6	6	6
b. Mushola	15	15	15	15
c. Gereja	0	0	0	0
d. Pura	0	0	0	0
e. Wihara	0	0	0	0
f. Klentheng	0	0	0	0
2. Prasarana Umum				
a. Balai Pertemuan	2	2	2	2
b. Sumur Desa	0	0	0	0
c. Pasar Desa	0	0	0	0
d. Tempat Wisata	1	1	1	1
e. Makam	8	8	8	8
f. Jumlah warga/rumah yang belum teraliri listrik	0	0	0	0

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

2.6 Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

2.6.1 Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 2.26
Data Panjang Jalan Tahun 2019

No	Uraian	Panjang (Km)	Keterangan
A	Jenis Permukaan		
1	Diaspal	5,3 Km	Baik/Rusak ringan
2	Kerikil / Makadam	4,25 Km	Sedang
3	Paving stone	2,2 Km	Baik
4	Cor Beton	2,64 Km	Baik
5	Tanah	1,5 Km	Sedang
B	Kondisi Jalan		
1	Baik	8,84 Km	-
2	Sedang	5,75 Km	-
3	Rusak ringan	1,3 Km	-
4	Rusak Berat	0 Km	-

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

2.6.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.27
Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2019

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	4	Buah
2	TK	4	Buah
3	SD	4	Buah
4	TPQ	10	Buah
5	Madin	6	Buah

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

2.6.3 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.28
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan 2019

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	Unit
2	Posyandu	5	Unit

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

2.7 Masalah dan Potensi Desa

2.7.1 Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

2.7.1.1 Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian.

Desa Wilangan termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

2.7.1.2 Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2010 - 2014 secara umum sudah menunjukkan perbaikan, namun demikian masih kurang berfungsinya Polindes Desa karena Rusak Berat, masyarakat miskin belum terlayani 100 %.

2.7.1.3 Belum memadainya pembangunan insfrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

2.7.1.4 Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

2.7.1.5 Masih Minimnya Kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa.

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

2.7.2 Potensi

Desa Wilangan memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

2.7.2.1 Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

- i. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di desa yang cukup baik.
- ii. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- iii. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa.

2.7.2.2 Potensi Ekonomi

- i. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya.
- ii. Terdapat Usaha – usaha kecil (Kerajinan tangan) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum memanfaatkan.

2.7.2.3 Potensi Sosial Budaya

- a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan.
- b. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- c. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan.
- d. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan.

Tabel 2.29
Data Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material :		
	a. Batu	0	m ³
	b. Pasir	0	m ³
2	Lahan Pertanian	138	Ha
3	Lahan Perkebunan	0	Ha
4	Lahan Kering	42,53	Ha
5	Hutan Desa	404	Ha

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

Tabel 2.30
Data Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	2.824	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	2.834	Orang
	c. Jumlah Kepala Keluarga	1.695	KK
2	Sumber Penghasilan utama Penduduk		
	a. Pertanian	1.118	KK
	b. Perikanan	16	KK
	c. Perkebunan	0	KK
	d. Pertambangan dan penggalian	0	KK
	e. Industri Pengolahan	6	KK
	f. Perdagangan	104	KK
	g. Angkutan	8	KK
	h. Jasa	13	KK
	i. TNI/POLRI/PNS/PERAWAT	40	KK
	j. Karyawan Swasta	390	KK
3	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan ;	3.873	Orang
	a. Lulusan S-1, S-2	79	Orang
	b. Lulusan SLTA	1.056	Orang
	c. Lulusan SLTP	1.478	Orang
	d. Lulusan SD / MI	996	Orang
	e. Tidak Tamat SD	264	Orang

Sumber data : Profil Desa Tahun 2018

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN

BAB III

VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Wilangan adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Wilangan Yang Tentram, Maju, Adil, Makmur dan Bermartabat”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Wilangan dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu ;

1. **Terwujudnya** terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Wilangan yang tentram, maju, adil, makmur dan bermartabat.
2. **Desa Wilangan** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan.
3. **Tentram** adalah suatu keadaan aman dan damai, tenang dan bahagia.
4. **Maju** adalah suatu keadaan menjadi lebih baik dan berkembang.
5. **Adil** adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah dan tidak memihak.
6. **Makmur** adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur terpenuhi kebutuhan lahir dan batin.
7. **Bermartabat** adalah kondisi masyarakat yang mempunyai harga diri, tatanan masyarakat yang mempunyai tingkat harkat kemanusiaan yang tinggi.

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Wilangan adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan program – program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wilangan periode sebelumnya yang telah tercantum dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Wilangan.

2. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi :
 - a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - b. Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA);
 - c. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
3. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Wilangan yang aman, tertib, guyub rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan prinsip – prinsip :
 - a. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi;
 - b. Ringan sama dijinjing berat sama dipikul dan mengutamakan kehidupan bergotong – royong.
4. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Desa Wilangan yang meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel;
 - b. Pelayanan kepada masyarakat yang prima yaitu cepat, tepat dan benar;
 - c. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong – royong.
5. Membantu pengurusan sertifikasi Program Agraria Nasional (PRONA) bagi masyarakat Desa Wilangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa Wilangan yang hendak dicapai meliputi 5 aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanganan bencana alam.

No	Bidang	Sasaran
1	Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa. 2. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa. 3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
		32

		4. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan Pelaporan (penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa dan informasi kepada masyarakat, pengembangan sistem informasi desa serta penyelenggaraan Forum Pembina Desa). 5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan lainnya.
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan di bidang pendidikan. 2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan. 3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman. 5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup. 6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika. 7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral. 8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik desa.
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1. Terselenggaranya kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. 2. Terselenggaranya kegiatan di bidang kebudayaan dan keagamaan. 3. Terselenggaranya kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga. 4. Terselenggaranya kegiatan di bidang Kelembagaan Masyarakat.

4	Pemberdayaan Masyarakat	1. Terselenggaranya kegiatan di bidang pertanian dan peternakan. 2. Terselenggaranya kegiatan di bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa. 3. Terselenggaranya kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. 4. Terselenggaranya kegiatan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. 5. Terselenggaranya kegiatan di bidang dukungan penanaman modal. 6. Terselenggaranya kegiatan di bidang perdagangan dan perindustrian.
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	1. Terselenggaranya kegiatan di bidang penanggulangan bencana. 2. Terselenggaranya kegiatan di bidang keadaan darurat. 3. Terselenggaranya kegiatan di bidang keadaan mendesak.

3.1. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai. Sasaran RPJM Desa Wilangan Tahun 2019–2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Utama RPJM Desa Wilangan Tahun 2019-2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Terwujudnya Desa yang mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri/IDK (predikat)	Berkembang	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)	1.363	1.267	1.132	1.029	948	871
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Sektoral RPJM Desa Wilangan Tahun 2019-2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1.	PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat desa	a. Angka Partisipasi SD/MI (%)	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Angka Partisipasi PAUD (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		e. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan desa tiap bulan (orang)	0	50	50	50	50	50	50
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan	a. Angka Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0	0

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
	masyarakat desa	b. Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0	0
		c. Balita dengan gizi baik	231	240	245	245	250	250	
3.	PERUMAHAN dan PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman masyarakat	a. Jumlah rumah layak huni	1.546	1.558	1.558	1.560	1.560	1.562	1.562
		b. Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	157	165	170	170	175	175	
		c. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	1.482	1.486	1.490	1.494	1.498	1.502	1.506
4.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga	Jumlah kasus kejahatan (kasus)	0	0	0	0	0	0	0
5.	KETENAGAKERJAAN: Menurunnya jumlah pengangguran	Angka pengangguran (%)	5 %	3 %	3 %	2 %	2 %	1 %	1 %

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
6.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (kasus)	0	0	0	0	0	0	0
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari	a. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT) b. Jumlah mata air yang masih hidup (titik) c. Luas Ruang Terbuka Hijau / RTH (Ha)	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	1	1	1	1

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	a. Persentase penduduk memiliki KK (%)	97 %	98 %	99 %	99 %	100 %	100 %	
		b. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%)	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		c. Persentase penduduk memiliki KTP (%)	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		d. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (%)	5 %	10 %	20 %	20 %	25 %	25 %	
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: Meningkatnya keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	a. Status BUM Desa	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	
		b. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000 ,-	10.000.000 ,-	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
		c. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	24	48	48	48	48	48	48
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA: Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	a. Jumlah peserta KB baru (orang)	91	100	100	100	100	100	100
		b. Jumlah peserta KB aktif (orang)	822	832	842	852	862	872	882
		c. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	212	215	215	215	220	220	220
11.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif	a. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah)	5	5	5	5	5	5	5



NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
12.	KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA: Meningkatkan kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya	b. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali per minggu)	1	1	1	1	1	1	1
		c. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	1	1	1	1	1	1	1
		a. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
		b. Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	2	5	5	5	5	5	5
		c. Jumlah prestasi Olahraga (buah)	2	5	5	5	5	5	5

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
13.	PERTANIAN: Meningkatnya produksi pertanian	d. Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	0	0	0	0	0	0	0
		a. Produksi tanaman pangan:	-	-	-	-	-	-	-
		b. Padi (ton/ha)	6	7	7	7	7	7	7
		c. Jagung (ton/ha)	7	8	8	8	8	8	8
		d. Kedelai (ton/ha)	0	0	0	0	0	0	0

Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran utama dan sasaran per sektor tersebut, dirumuskan Program dan Kegiatan Desa sesuai matrik RPJM Desa.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA



BAB IV

INDIKATOR KINERJA

.1 PROGRAM INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Wilangan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai enam tahun kedepan, sebagai berikut:

4.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.1.1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD
- g. Penyediaan Insentif RT/RW
- h. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa

4.1.1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

- a. Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan
- b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- c. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa

4.1.1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
- b. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran Profil Desa
- c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
- d. Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- e. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif
 - f. Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
- 4.1.1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa
 - g. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - h. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - i. Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
 - j. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
 - k. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - l. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa
 - m. Forum Pembina Desa
- 4.1.1.5 Sub Bidang Pertanahan
- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - b. Administrasi Pertanahan
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - d. Mediasi Konflik Pertanahan
 - e. Penyuluhan Pertanahan
 - f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - g. Penetapan Batas/Patok Tanah Desa

4.1.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.1.2.1 Sub Bidang Pendidikan

- a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD /TK /TPA /TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- h. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- i. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- j. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi

4.1.2.2 Sub Bidang Kesehatan

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
- b. Penyelenggaraan Posyandu
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- f. Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

4.1.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pemeliharaan Jalan Desa
- b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman
- c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- d. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
- e. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

- f. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
 - g. Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa
 - h. Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - i. Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - j. Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - k. Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - l. Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
 - m. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - n. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- 4.1.2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman
- a. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
 - b. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - c. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
 - d. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
 - e. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
 - f. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - g. Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
 - h. Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
 - i. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
 - j. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
 - k. Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - l. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN
- 4.1.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- a. Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - b. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - c. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- 4.1.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - c. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- 4.1.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
- 4.1.2.8 Sub Bidang Pariwisata
 - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - b. Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

4.1.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 4.1.3.1 Ketentraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat.
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
 - d. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - e. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - f. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - g. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
- 4.1.3.2 Kebudayaan Dan Kegamaan.
 - a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
 - b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

- c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Keagamaan Milik Desa
 - e. Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa.
- 4.1.3.3 Kepemudaan Dan Olah Raga
- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
 - b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa
 - c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - e. Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - f. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
- 4.1.3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- a. Pembinaan Lembaga Adat
 - b. Pembinaan LPMD
 - b. Pembinaan PKK
 - c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - d. Pembinaan Karang Taruna
 - e. Lain – lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

4.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

- 4.1.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- a. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
 - b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
- 4.1.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - b. Peningkatan Produksi Peternakan
 - c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - e. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan

- 4.1.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa
 - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
 - c. Peningkatan kapasitas BPD
- 4.1.4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - a. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
- 4.1.4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
- 4.1.4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - a. Pembentukan BUM Desa
 - b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
- 4.1.4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - a. Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa
 - b. Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa
 - c. Pengembangan Industri kecil level Desa
 - d. Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi
 - e. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian

4.1.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

- 4.1.5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Penanggulangan Bencana
- 4.1.5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat
 - Keadaan Darurat
- 4.1.5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Keadaan Mendesak

Matrik RPJM Desa
Tahun 2019 - 2025

WILANGAN
WILANGAN
NGANJUK
JAWA TIMUR

15

1	Fasilitasi Pengembangan Desa	5	Sub Bidang Pertanahan	2	Penyusunan Musyawarah Desa	Desa	1 Tahun	Pendes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24,000,000	APBDes	✓
				3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	1 Tahun	Pendes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24,000,000	APBDes	✓
				4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	1 Tahun	Pendes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APBDes	✓
				5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Pemilikan Aset Desa	Desa	1 Tahun	Pendes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000	APBDes	✓
				6	Penyusunan Kebijakan Desa	Desa	1 Tahun	Pendes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000	APBDes	✓
				7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa	1 Tahun	Pendes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000	APBDes	✓
				8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	1 Tahun	Pendes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000	APBDes	✓
				10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pukades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Desa	1 Tahun	Pendes			✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBDes	✓
				12	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	Pendes			✓				40,000,000	APBDes	✓
				13	Forum Pemula Desa	Desa	1 Tahun	Pendes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28,800,000	APBDes	✓
				1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	1 Tahun	Pendes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000	APBDes	✓
				2	Facilitasi Sertifikasi Tanah Untuk Masyarakat Miskin	Desa	1 Tahun	Pendes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APBDes	✓
				3	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 Tahun	Pendes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000	APBDes	✓
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Pendidikan	4	Pencatatan Batas/Patok Tanah Desa	Desa	1 Tahun	Pendes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000	APBDes	✓
				5	Penerapan dan Pengawasan Batas Desa	Desa	1 Tahun	Pendes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000	APBDes	✓
				Jumlah Bidang 1													
				1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	1 Tahun	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	428,400,000	APBDes	✓
				2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Desa	1 Tahun	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000	APBDes	✓
				3	Pencelenggaraan Sarana dan Pemasaran Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1 Tahun	Masy Desa		✓					25,000,000	APBDes	✓
				4	Pencelenggaraan Sarana dan Pemasaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	1 Tahun	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000	APBDes	✓
				5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Pemasaran/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa	1 Tahun	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90,000,000	APBDes	✓
				6	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Desa	1 Tahun	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APBDes	✓
				7	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa	1 Tahun	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000	APBDes	✓
				8	Kegiatan Inisiatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	Desa	1 Tahun	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	APBDes	✓

2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polimes Milik Desa	Desa	1 Tahun	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90,000,000	APBDes	✓
				2	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 Tahun	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	810,000,000	APBDes	✓
				3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa	1 Tahun	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000	APBDes	✓
				4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	1 Tahun	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APBDes	✓
				5	Pengasahan Bersama atau Bina Keluarga Bahita (BKB)	Desa	1 Tahun	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48,000,000	APBDes	✓
				6	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	1 Tahun	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APBDes	✓
				7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	1 Tahun	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBDes	✓
				8	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	Desa	1 Tahun	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35,000,000	APBDes	✓
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	2000 m	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	APBDes	✓
				2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	3000 m	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	750,000,000	APBDes	✓
				3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa	300 m	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75,000,000	APBDes	✓
				4	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	Desa	800 m	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APBDes	✓
				5	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	1 unit	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBDes	✓
				6	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Pelaksanaan Milik Desa	Desa	1 unit	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBDes	✓
				7	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Capura/Batas Desa	Desa	4 unit	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APBDes	✓
				8	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa	1000 m	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90,000,000	APBDes	✓
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	Desa	24 unit	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000	APBDes	✓
				2	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	Desa	1000 m	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APBDes	✓
				3	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	Desa	48 unit	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96,000,000	APBDes	✓
				4	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APBDes	✓
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa	4 titik	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000	APBDes	✓
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa	10 titik	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APBDes	✓
				2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa	1 unit	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,000,000	APBDes	✓
				3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringul/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa	1 unit	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APBDes	✓
				4	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APBDes	✓

Jumlah Bidang 2													
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Keterampilan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Masyarakat	1	Pengabdian/Persekolahan Pos Kesehatan Desa	Desa	8 titik	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	120,000,000	APBDes	
		2	Pengabdian dan Peningkatan Kapasitas Terpadu Kesehatan/Keterampilan oleh Pemerintah Desa (Salimatus desa)	Desa	31 orang	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	55,800,000	APBDes
		3	Koordinasi Pembinaan Keterampilan, Keterampilan, dan Pelindungan Masyarakat	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000	APBDes
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Sekolah Lokal Desa	Desa	2 keg	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	3,000,000	APBDes
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesehatan dan Kehidupan Tingkat Desa	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	18,000,000	APBDes	
		2	Pengabdian Kontingen Group Kesehatan dan Kehidupan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Desa	1 keg	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APBDes
		3	Penyenggaraan Festival Kesehatan, Adat/Kebudayaan, dan Kemandirian tingkat Desa	Desa	4 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	240,000,000	APBDes
		4	Pembinaan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan /Rumah Adat /Kecamatan Mily Desa	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APBDes
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	5	Pengabdian Kontingen Kesehatan dan Kehidupan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APBDes	
		1	Pengabdian Kontingen Kesehatan dan Kehidupan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APBDes
		2	Penyenggaraan pelatihan kepemimpinan tingkat Desa	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000	APBDes
		3	Penyenggaraan Festival/Lomba Keterampilan dan Olahraga tingkat Desa	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000	APBDes
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	4	Pembinaan Sarana dan Prasarana Kehidupan dan Olah Raga Mily Desa	Desa	2 unit	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	20,000,000	APBDes	
		5	Pembinaan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan dan Olah Raga Mily Desa	Desa	1 unit	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APBDes
		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000	APBDes
		7	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Keterampilan dan Olah Raga	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APBDes
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Pembinaan Lembaga Adat	Desa	1 Paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	20,000,000	APBDes	
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 paket	LPMD	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APBDes
		3	Pembinaan PKK	Desa	1 paket	PKK	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000	APBDes
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APBDes
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	5	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 paket	KARTAR	✓	✓	✓	✓	60,000,000	APBDes	
		6	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Keterampilan Masyarakat	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBDes
		Jumlah Bidang 3											
		1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan)	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APBDes
4	Pembinaan Masyarakat Desa	1	Kelatan dan Perikanan	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APBDes	
4	Pembinaan Masyarakat Desa	2	Pelatihan/Bantuan/Pengabdian THG untuk Perikanan Darat	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBDes	
		1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APBDes
4	Pembinaan Masyarakat Desa	2	Pertanian dan Peternakan	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APBDes	

4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3	Penelitian/ Survei/ Inguat Tersebut/ Seputihnya	Desa	2000 m	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APBDes	✓
				4	Pelatihan/ Biotek/ Pengerahan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan *	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	APBDes	✓
				5	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	APBDes	✓
				1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa	1 paket	Kades	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000	APBDes	✓
				2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	1 paket	Pendes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24,000,000	APBDes	✓
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	1 paket	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000	APBDes	✓
				1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	1 Paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80,000,000	APBDes	✓
				1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ BUMDES	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APBDes	✓
				2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	APBDes	✓
				3	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APBDes	✓
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	APBDes	✓
				2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000	APBDes	✓
				1	Pengembangan Industri kecil level Desa	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000	APBDes	✓
				2	Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Penda impijan kelompok usaha ekonomi	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000	APBDes	✓
				Jumlah Bidang 4											772,000,000		
5	Peninggulangan Bencana, Kadaan Darurat dan Mendesak	1	Peninggulangan Bencana	1	Peninggulangan Bencana	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000	APBDes	✓
				2	Kadaan Darurat	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000	APBDes	✓
				3	Kadaan Mendesak	Desa	1 paket	Masy Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APBDes	✓
				Jumlah Bidang 5											210,000,000		
				Jumlah TOTAL											12,229,708,000		



BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk 6 (enam) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Wilangan, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Wilangan tahun 2019-2025 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.


KEPALA DESA WILANGAN
LINA MUNTIANI